



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA TALU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jati II

Pasaman Barat - Sumatera Barat 26366

Telp. 07537464094 Fax. 07537464022

e-mail : pa_talu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

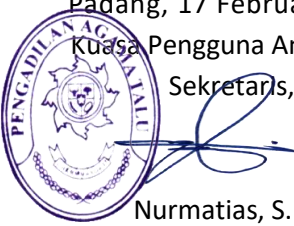
Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Talu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Talu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 17 Februari 2022
Kua Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

Nurmatias, S. Ag
NIP. 197403312006041005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Lampiran	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	14
V. Catatan atas Laporan Keuangan	16
A. Penjelasan Umum	16
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Talu	16
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.3. Basis Akuntansi	17
A.4. Dasar Pengukuran	18
A.5. Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	27
B.1. Pendapatan	27
B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	27
B.2. Belanja	28
B.2.1. Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.3. Belanja Modal	Error! Bookmark not defined.
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Error! Bookmark not defined.
B.2.3.2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Error! Bookmark not defined.
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Aset Lancar	31

C.1.1.	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	31
C.1.2.	Persediaan	31
C.2.	Aset Tetap	32
C.2.1.	Tanah	33
C.2.2.	Peralatan dan Mesin	33
C.2.3.	Gedung dan Bangunan	34
C.2.4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	34
C.2.5.	Aset Tetap Lainnya	34
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	35
C.3.	Aset Lainnya	35
C.3.1.	Aset Tak berwujud	36
C.3.2.	Aset Lain-lain	36
C.3.3.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	37
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek	37
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	37
C.5.	Ekuitas	38
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	39
D.2.	Beban Pegawai	39
D.3.	Beban Persediaan	40
D.4.	Beban Barang dan Jasa	40
D.5.	Beban Pemeliharaan	41
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	41
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
D.8.	Kegiatan Non Operasional	42
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1.	Ekuitas Awal	44
E.2.	Surplus (defisit) LO	44
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	44
E.3.1.	Selisih Revaluasi Aset	44

E.3.2.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	45
E.4.	Transaksi Antar Entitas	45
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	46
E.4.2.	Transfer Masuk / Transfer Keluar	46
E.5.	Ekuitas Akhir	47
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	48
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	48
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	48
F.2.1.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK	48
F.2.2.	Rekening Pemerintah	48
F.2.3.	Revisi DIPA	48
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB	49
F.2.5.	Catatan Penting Lainnya	49

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020	2
Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	3
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	3
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang	25
Tabel 7 Tabel Masa Manfaat	26
Tabel 8 Revisi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPer 31 Desember 2021	27
Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBPer 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	28
Grafik 11 Perubahan PNBPer Tahun 2020 dan 2021	28
Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021	29
Grafik 13 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021	29
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020	30
Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	30
Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020 ...	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 19 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	31
Tabel 20 Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	32
Tabel 22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Tabel 23 Rincian Saldo Tanah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24 Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2021	34
Tabel 25 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021	34
Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021	35
Tabel 27 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	35
Tabel 28 Rincian Aset tak Berwujud TA 2021	36
Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2021	37
Tabel 30 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	37
Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021	38
Tabel 32 Rincian PNBPer TA 2021 dan TA 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 33 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 34 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 35 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	40
Tabel 36 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	41
Tabel 37 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	42

Tabel 38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020	42
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020	42
Tabel 40 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per Akun TA 2021	45
Tabel 41 Transaksi Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021	45
Tabel 42 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021	46
Tabel 43 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2021 dan 2020	46
Tabel 44 Perbandingan Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2021 dan 2020	47
Tabel 45 Revisi Satker TA 2021	Error! Bookmark not defined.
Tabel 45 Daftar Ralat SPM, SSBP dan SSPB TA 2021	Error! Bookmark not defined.

Lampiran :

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



PENGADILAN AGAMA TALU

Jalan Jati II Simpang Empat Telp.(0753) 7464094 Fax (0753) 7464022

Website : www.pa-talu.net Email: pa_talu@yahoo.co.id

Pasaman Barat – Sumatera Barat. 26366

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 17 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Nurmatias, S. Ag

NIP. 197403312006041005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Talu Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 91.343.500 atau mencapai 164 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 55.554.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp 98.900.000 atau mencapai 94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 105.100.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	55.554.000	91.343.500	164	81.665.000
Belanja Negara	105.100.000	98.900.000	94	34.500.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.393.800 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.393.800, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.393.800 dan Rp 1.393.800.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	1.393.800	96.800	1.297.000	1.339
Aset Tetap	0	0	0	0
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	1.393.800	96.800	1.297.000	1.393
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.393.800	96.800	1.297.000	1.339
Jumlah Kewajiban	1.393.800	96.800	1.297.000	2.53
Ekuitas				
Jumlah Ekuitas	1.393.800	96.800	1.297.000	1.393
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.393.800	96.800	1.297.000	1.393

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 91.343.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 99.418.800 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (8.075.300), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (8.075.300).

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/Penurunan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	91.343.500	81.665.000	9.678.500	11.851
Beban Operasional	99.418.800	37.039.879	62.378.921	168.41
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(8.075.300)	44.625.121	(52.700.421)	(118.09)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	0
Pos Luar Biasa	0	0	0	0
Surplus (Defisit) - LO	(8.075.300)	44.625.121	(52.700.421)	(118.09)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 96.800 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (8.075.300), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 9.372.300 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 1.393.800.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/Penurunan	
	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Rp	%
EKUITAS AWAL	96.800	1.184.800	(1.088.000)	
Surplus (Defisit) LO	(8.075.300)	44.625.121	(52.700.421)	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	0	0	
Transaksi Antar Entitas	9.372.300	(45.713.121)	55.085.421	

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	1.297.000	(1.088.000)	2.385.000
EKUITAS AKHIR	1.393.800	96.800	1.297.000

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Pendapatan Negara, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara dan Hibah, untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Talu
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
		Anggaran	Realisasi	% thd Angg	Realisasi
A. Pendapatan	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	55.554.000	91.343.500	164	81.665.000
Jumlah Pendapatan		55.554.000	91.343.500	164	81.665.000
B. Belanja	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2. Belanja Barang	B.2.2.	105.100.000	98.900.000	94	34.500.000
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
Jumlah Belanja		105.100.000	98.900.000	94	34.500.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

Pengadilan Agama Talu
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	1.393.800	96.800
Jumlah Aset Lancar		1.393.800	96.800
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	0	0
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		1.393.800	96.800
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0

EKUITAS			
Ekuitas	C.5	1.393.800	96.800
Jumlah Ekuitas		1.393.800	96.800
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		1.393.800	96.800

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

Pengadilan Agama Talu
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	91.343.500	81.665.000
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	518.000	2.539.879
Beban Barang dan Jasa	D. 4	72.650.000	6.000.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	26.250.000	28.500.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	0	0
Jumlah Beban		99.418.800	37.039.879
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(8.075.300)	44.625.121
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	D. 8	0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(8.075.300)	44.625.121
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(8.075.300)	44.625.121

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Pengadilan Agama Talu
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	96.800	1.184.800
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(8.075.300)	44.625.121
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E 3.2	0	1.400.000
Transaksi Antar Entitas	E. 4	9.372.300	(45.713.121)
Ekuitas Akhir	E. 5	1.393.800	96.800

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Talu

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan antara lain semakin bertambahnya kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama yaitu mengenai Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat , Hibah , Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk itu, Pengadilan Agama Talu telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Talu Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Talu;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Talu;
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur Pengadilan Agama Talu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Administrasi Pengadilan Agama Talu yang akuntabel;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Talu menyusun rencana strategis dengan tujuan:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara Melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Talu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000

(tiga ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Talu tidak mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan: Rp
91.343.500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 91.343.500 atau mencapai 164 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 55.554.000. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh Pengadilan Agama Talu merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Realisasi PNBP:
Rp 91.343.500*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 91.343.500 atau mencapai 164 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 55.554.000. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara Tk I	21.000.000	33.930.000	161
2	Pendapatan Ongkos Perkara Tk Banding	50.000	200.000	150
3	Pendapatan Ongkos Perkara kasasi dan PK	50.000	250.000	100
4	Pendapatan Ongkos Perkara Eksekusi	10.000	20.000	100
5	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	34.444.000	56.943.500	152
Total Pendapatan		55.554.000	91.343.500	132

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 32 persen dibanding realisasi pendapatan TA 2020.

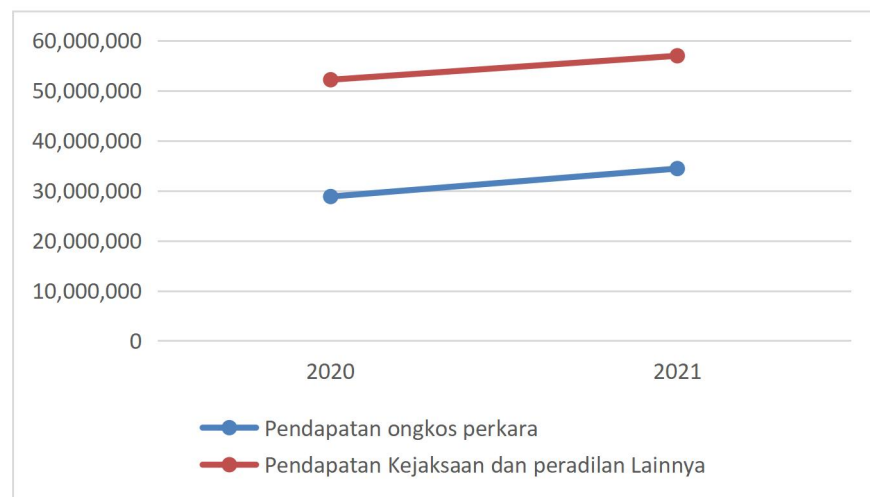
Perbandingan realisasi PNBPN TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara Tk I	33.930.000	29.310.000	4.620.000	50
2.	Pendapatan Ongkos Perkara Tk Banding	200.000	300.000	(100.000)	(100)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara kasasi dan PK	250.000	150.000	100.000	150
4.	Pendapatan Ongkos Perkara Eksekusi	20.000	40.000	20.000	100
5.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	56.943.500	52.156.000	4.787.500	9.1
	Total Pendapatan	91.343.500	80.976.500	(120.319)	(25)

Perubahan pendapatan dari tahun 2020 ke 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 11 Perubahan PNBPN Tahun 2020 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)



B.2. Belanja

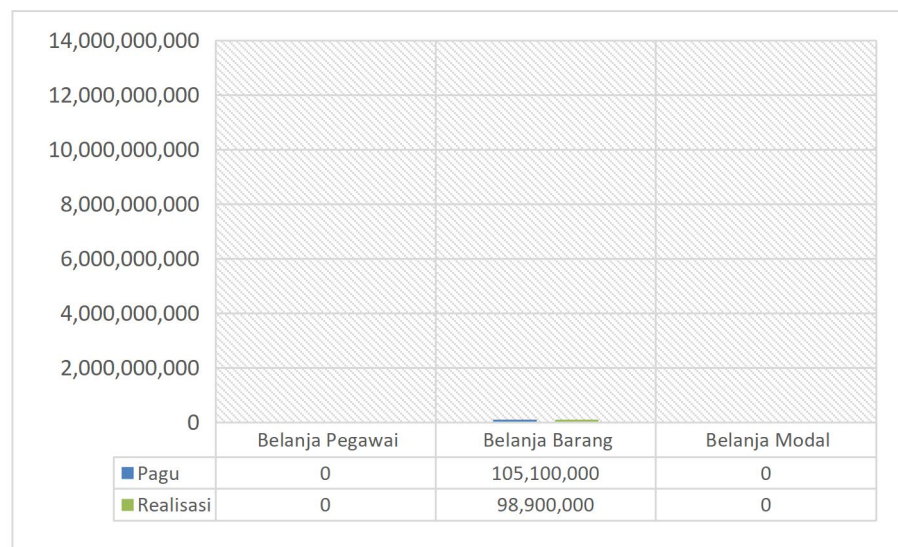
Realisasi
Belanja
Negara : Rp
98.900.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 98.900.000. setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99 persen dari anggaran senilai Rp 105.100.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	105.100.000	98.900.000	94
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	105.100.000	98.900.000	0
Pengembalian Belanja		(6.200.000)	
Total Belanja Netto	105.100.000	98.900.000	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 13 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Dibanding tahun 2020, persentase realisasi belanja tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6 persen. Penurunan ini terjadi pada klasifikasi belanja barang dan belanja pegawai dan belanja modal. Hal ini disebabkan antara lain :

- * Realisasi terlambat karena keterlambatan kontrak pemenang Pos bakum, sebab pada tahap pertama tidak ada yang memenuhi syarat

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	98.900.000	34.500.000	64.400.000	300
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	98.900.000	34.500.000	64.400.000	300

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp
98.900.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 98.900.000 dan Rp 34.500.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan dari segi jumlah anggaran sebesar 280 persen dibanding tahun anggaran yang lalu, namun persentase realisasi mengalami penurunan sebesar 6 %. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Anggaran Tahun 2021 lebih besar dari anggaran tahun 2020
- Tidak terealisasinya seluruh anggaran pada tahun 2021 karena terlambatnya penunjukan rekanan pos bakum, sebab pada tahap pertama tidak ada yang memenuhi syarat.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
1. Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
2. Belanja Barang Non Operasional	8.250.000	6.000.000	2.250.000	37.5
3. Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000	28.500.000	2.250.000	7.8
4. Belanja Jasa Konsultan	64.400.000	0	64.400.000	100
Total Belanja Brutto	105.100.000	34.500.000	64.400.000	48.43
Pengembalian Belanja	6.200.000	0	6.200.000	100

Total Belanja Netto	98.900.000	34.500.000	64.400.000	48.43
---------------------	------------	------------	------------	-------

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp
1.393.800

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.393.800 dan Rp 96.800.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 19 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0	0
Persediaan	1.393.800	96.800
Total Aset Lancar	1.393.800	96.800

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid): Rp 0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkannya secara penuh dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/ jasa belum diterima seluruhnya.

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp
1.393.800

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.393.800 dan Rp 96.800. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	1.393.800	96.800
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
	Total	1.393.800	96.800

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor: W3-A14/ /PL.03/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021 yang terlampir pada data dukung Laporan Keuangan ini.

Adapun mutasi persediaan selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	96.800
Mutasi Tambah	
Pembelian Barang Konsumsi	1.393.800
Pembelian Bahan untuk Pemeliharaan	0
Mutasi Kurang	
Pemakaian Barang Konsumsi	(96.800)
Pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan	
Koreksi Penyesuaian Persediaan Barang Konsumsi	
Koreksi Penyesuaian Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	
Opname Fisik Barang Konsumsi	
Opname Fisik Bahan untuk Pemeliharaan	
Saldo per 31 Desember 2021	1.393.800

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
0*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp. 0. Pada tahun 2021 ini tidak ada mutasi aset tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
	0	0	0	0	0	0
	Jumlah					0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Tabel 24 Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tabel 25 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Kesalahan input IP	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

**Aset Tetap
Lainnya: Rp 0**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama, yaitu sebesar Rp 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp (0)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp (0) dan Rp (0).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.3. Aset Lainnya**Aset Tetap : Rp 0**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Rp Naik/ (Turun)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C.3.1. Aset Tak berwujud

Aset Tak
Berwujud : Rp 0

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yakni sebesar Rp 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Aset tak Berwujud TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Software Komputer		
1.	Website <i>pta-padang.go.id</i>	0
2.	Aplikasi Pustaka	0
3.	Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS and FS	0
Jumlah Total		0

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sama yakni sebesar Rp 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Talu serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0

Nilai Buku 31 Desember 2021

0

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya :
Rp (0)*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp (0) dan Rp.(0). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Aset lain-lain	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1.	Aset tak berwujud	0	(0)	0
2.	Aset lain-lain	0	(0)	0
Jumlah Total		0	(0)	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Talu per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 30 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
Jumlah	0	0

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 0*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Talu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.		0	0
	Jumlah	0	0

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp 1.393.800

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.393.800 dan Rp 96.800. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*PNBP : Rp
91.343.500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 91.343.500 dan Rp 81.665.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 32 Rincian Estimasi dan Realisasi PNPB per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
2.	Pendapatan Ongkos Perkara Tk I	21.000.000	33.930.000	161
2	Pendapatan Ongkos Perkara Tk Banding	50.000	200.000	150
3	Pendapatan Ongkos Perkara kasasi dan PK	50.000	250.000	100
4	Pendapatan Ongkos Perkara Eksekusi	10.000	20.000	100
5	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	34.444.000	56.943.500	152
Total Pendapatan		55.554.000	91.343.500	132

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp 0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	0	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
518.000*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 518.000 dan Rp .539.879. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Kenaikan beban persediaan disebabkan penganggaran belanja barang persediaan lebih tertib dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	518.000	2.539.879	(2.021.879)	(79.60)
Total Beban Persediaan	518.000	2.539.879	(2.021.878)	(79.60)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
72.650.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 72.650.000 dan Rp 6.000.000. Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban ini dipengaruhi oleh akun-akun pembentuknya sebagaimana di bawah ini.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.250.000	6.000.000	2.250.000	37
Beban jasa konsultan	64.400.000	0	64.400.000	100
Total Beban Jasa	72.650.000	6.000.000	66.650.000	137

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan:
Rp 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
26.250.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 26.250.000 dan Rp 28.500.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	26.250.000	28.500.000	(2.250.000)	(8.6)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	26.250.000	28.500.000	(2.250.000)	(8.6)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi : Rp
0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Kegiatan Operasional	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan	0	0	0	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus(defisit)
Kegiatan Non
Operasional :
Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional	0	0	0	0
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya bersumber dari Pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 0. Sedangkan bebannya bersumber dari Beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp 0.

Pendapatan/ beban penyesuaian nilai persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO).

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp 1.393.800* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.393.800 dan Rp 96.800.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit)
LO : Rp
(8.075.300)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2018 adalah sebesar Rp (8.075.300) dan Rp (44.625.121) . Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/K
esalahan
Mendasar
Koreksi
Yang
Menambah
/Menguran
gi Ekuitas:
Rp.0* Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tahun 2021 ini koreksi yang terjadi pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu berupa Koreksi Atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset : Rp 0* Selisih Revaluasi Aset Tetap diperoleh dari penilaian ulang aset tetap. Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0.

Nilai revaluasi aset tetap tersebut tercantum pada Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor: LHIP: 819/REV/WKN.03/KNL.01/2021 tanggal 12 November 2021. Selisih revaluasi ini terjadi pada akun tanah dan bangunan gedung.

Rincian selisih revaluasi aset tetap per akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per Akun TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian Akun	Nilai Revaluasi
1.		0
2.		0
3.		0
	Total	0

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi : Rp 0*

Koreksi nilai aset non revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi, misalnya koreksi aset yang diakibatkan dari temuan BPK. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

Rincian transaksi dari Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Transaksi Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021
(dalam satuan Rupiah)

No	Tanggal Dokumen	Jurnal BMN	Uraian Jurnal	Debit	Kredit	Nilai
1						

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas : Rp 0*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan

31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 42 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Jumlah	0

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 0.

Sedangkan perbandingannya pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
DDEL	0	0
DKEL	0	0
Jumlah	0	0

E.4.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset / Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada interkal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.

Sedangkan perbandingannya pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Perbandingan Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Transfer Masuk	0	0
Transfer Keluar	0	0
Jumlah	0	0

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.393.800 dan Rp 96.800.
Rp 1.393.800

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan keuangan tahun yang lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Terdapat 1 rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Talu dengan kode BA.ES1 005.04 (Badan Peradilan Agama), yaitu : rekening nomor 651544020361000 atas nama BPG 091 Pengadilan Agama Talu pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Simpang Empat yang digunakan sebagai Penampung DIPA Badilag dengan saldo per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Lubuk Sikaping dengan nomor S-1654/WPB. 12/ KP. 06/ 2020 tanggal 23 juni 2020

Terdapat 1 rekening Lainnya yang digunakan untuk Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 di Pengadilan Agama Talu yaitu : rekening nomor 061501000947306 RPL 091 PA Talu Utk PDT Biaya Perkara sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Lubuk Sikaping dengan nomor: S-816/WPB. 03/ KP. 091/ 2018 Tanggal 16 November 2018.

F.2.3. Revisi DIPA

Tidak ada i revisi DIPA yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Talu selama Tahun 2021. Uraian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM selama tahun 2021

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan yang perlu dicantumkan dalam pos ini.

F.2.6. Monitoring Aplikasi e-Rekon&LK